

# **PENGARUH ALIANSI AUKUS TERHADAP DINAMIKA KETEGANGAN REGIONAL DI LAUT TIONGKOK SELATAN**

**Oleh: Nadia Puspita Sari**

**Pembimbing: Dr. Saiman, S. IP., M.Si**

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pengaruh aliansi keamanan trilateral Australia–Inggris–Amerika Serikat (AUKUS) terhadap dinamika ketegangan keamanan di Laut Tiongkok Selatan. Pembentukan AUKUS pada 2021 menandai perubahan penting dalam konfigurasi keamanan Indo-Pasifik di tengah meningkatnya rivalitas strategis Amerika Serikat dan Tiongkok. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dampak AUKUS terhadap persepsi ancaman, respons negara-negara Asia Tenggara, dan ketegangan regional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dokumen resmi pemerintah, serta pernyataan aktor negara. Analisis didasarkan pada Teori Kompleks Keamanan Regional dan perspektif konstruktivisme. Analisis didasarkan pada Teori Kompleks Keamanan Regional dan perspektif konstruktivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AUKUS memperkuat kapabilitas pertahanan Australia sekaligus meningkatkan persepsi ancaman Tiongkok serta memunculkan respons ASEAN yang terfragmentasi, sehingga meningkatkan kompleksitas dan sensitivitas keamanan di Laut Tiongkok Selatan.

**Kata Kunci:** AUKUS, Laut Tiongkok Selatan, Ketegangan Keamanan, ASEAN.

## **ABSTRACT**

*This study analyzes the impact of the Australia–United Kingdom–United States (AUKUS) trilateral security alliance on the dynamics of security tensions in the South China Sea. The establishment of AUKUS in 2021 marked a significant shift in the Indo-Pacific security configuration amid intensifying strategic rivalry between the United States and China. This study aims to examine the effects of AUKUS on threat perceptions, the responses of Southeast Asian countries, and regional security tensions. It employs a qualitative descriptive approach using secondary data from books, academic journals, policy reports, official government documents, and statements by state actors. The analysis is grounded in Regional Security Complex Theory and a constructivist perspective. The findings indicate that AUKUS strengthens Australia's defense capabilities while heightening China's threat perceptions and generating fragmented responses among ASEAN states, thereby increasing the complexity and sensitivity of security dynamics in the South China Sea.*

**Keywords:** AUKUS, South China Sea, Security Tensions, ASEAN.

## A. PENDAHULUAN

Kawasan Laut Tiongkok Selatan yang terletak di perairan Asia Tenggara memiliki signifikansi strategis yang tidak dapat diabaikan, baik dari sisi ekonomi, geopolitik, maupun keamanannya. Laut ini merupakan jalur perdagangan utama dunia yang menjadi rumah bagi kekayaan sumber daya alam, perikanan, dan berbagai fasilitas militer penting<sup>1</sup>. Di samping itu, wilayah ini menjadi titik panas dalam perselisihan diplomatik akibat klaim teritorial antara Tiongkok dan beberapa negara Asia Tenggara yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam, terutama terkait klaim historis Tiongkok melalui *Nine-Dashed Line* sejak tahun 1947.<sup>2</sup>

Sejak tahun 1970-an, Tiongkok secara konsisten menunjukkan sikap yang semakin tegas dalam memperkuat klaimnya di kawasan, yang tercermin melalui peningkatan patroli, reklamasi, dan pembangunan infrastruktur militer di wilayah sengketa seperti Kepulauan Paracel dan Spratly<sup>3</sup>. Perilaku ini memicu kekhawatiran dan protes diplomatik dari negara-negara yang terlibat langsung dalam sengketa, khususnya Vietnam dan Filipina.

Ketegasan Tiongkok tersebut mendorong Amerika Serikat dan sekutunya mengambil langkah strategis untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan melalui pembentukan aliansi keamanan trilateral AUKUS pada tahun 2021. Aliansi ini bertujuan memperkuat keamanan kolektif Indo-Pasifik<sup>4</sup>, khususnya melalui peningkatan kapabilitas pertahanan Australia, termasuk pengadaan kapal selam bertenaga nuklir dan pengembangan teknologi pertahanan canggih<sup>5</sup>.

Sejak diumumkannya AUKUS, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan menunjukkan peningkatan, ditandai dengan reaksi keras Tiongkok dan respons yang terfragmentasi di antara negara-negara Asia Tenggara. Sebagian negara memandang AUKUS sebagai penyeimbang terhadap Tiongkok, sementara negara lain bersikap lebih hati-hati karena khawatir aliansi ini justru memicu eskalasi konflik dan meningkatkan keterlibatan kekuatan eksternal.<sup>6</sup>

Kehadiran AUKUS tidak hanya berdampak pada

---

<sup>1</sup> Auliah Ambarwati et al., "Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik Di Kawasan Laut China Selatan," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 240–46, <https://www.researchgate.net/publication/332844551>.

<sup>2</sup> Muhar Junef, "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan (Maritime Territorial Dispute in South China Sea)," *Jurnal Penelitian Hukum* 18, no. 2 (2018): 219–40.

<sup>3</sup> Andrew Chubb, *PRC Assertiveness in the South China Sea: Measuring Continuity and Change, 1970–2015*, *International Security*, Vol. 45 (2021), [https://doi.org/10.1162/isec\\_a\\_00400](https://doi.org/10.1162/isec_a_00400).

---

<sup>4</sup> Bangkit Satriyo Hariyadin, "Kepentingan Amerika Serikat Dalam Pembentukan Kerja Sama Pertahanan AUKUS Tahun 2021," *Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2024): 594–609, <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2904>.

<sup>5</sup> Jamal Din Aulia and Ahmad Sahide, "Regional Stability Rivalry in the Indo Pacific Region: China's Interests in Responding the AUKUS Trilateral Pact International," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 9 (2022): 412–23.

<sup>6</sup> Ahmad Rizky M. Umar and Yulida Nuraini Santoso, "AUKUS and Southeast Asia's Ontological Security Dilemma," *International Journal* 78, no. 3 (2023): 435–53, <https://doi.org/10.1177/00207020231197767>

keseimbangan militer, tetapi juga membentuk ulang persepsi dan dinamika keamanan regional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana aliansi AUKUS memengaruhi dinamika ketegangan regional di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis pengaruh aliansi AUKUS terhadap dinamika ketegangan regional di Laut Tiongkok Selatan. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana keberadaan AUKUS memengaruhi ketegangan di kawasan serta respons negara-negara yang terlibat dalam sengketa maritim ini.

Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus, dengan Laut Tiongkok Selatan sebagai fokus utama. Studi kasus dalam penelitian kualitatif memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena spesifik dalam konteks keamanan regional yang sedang berlangsung<sup>7</sup>. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai aliansi AUKUS dan dampaknya terhadap dinamika geopolitik kawasan berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber utama berupa buku, jurnal akademik, artikel berita, laporan, serta pernyataan resmi yang relevan. Data yang

diperoleh dianalisis dengan cara dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori hubungan internasional, khususnya teori keamanan regional, untuk memahami bagaimana aliansi keamanan seperti AUKUS membentuk dinamika stabilitas dan ketegangan di kawasan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Geopolitik di Laut Tiongkok Selatan**

Laut Tiongkok Selatan menempati posisi strategis dalam geopolitik Indo-Pasifik karena perannya sebagai jalur perdagangan internasional utama dan kawasan yang kaya sumber daya alam. Wilayah ini dilalui oleh lebih dari sepertiga lalu lintas maritim global dengan nilai perdagangan tahunan mencapai lebih dari 3 triliun dolar<sup>8</sup>, serta diperkirakan memiliki cadangan energi yang signifikan dan menjadi salah satu wilayah tangkapan ikan terbesar di dunia. Kondisi ini menjadikan Laut Tiongkok Selatan vital bagi ketahanan energi dan pangan negara-negara sekitarnya.

Selain bernilai ekonomi, Laut Tiongkok Selatan juga merupakan arena persaingan strategis kekuatan besar. Sejak pasca-Perang Dunia II, Amerika Serikat memasukkan kawasan ini ke dalam strategi *island chain* untuk menahan ekspansi

---

<sup>7</sup> Rizal Safarudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.

---

<sup>8</sup> John Grady, "Panel: New U.S. South China Sea Report Designed to Push Back Against Beijing's Expansive Claims," *USNI News*, 2022, <https://news.usni.org/2022/01/25/panel-new-u-s-south-china-sea-report-designed-to-push-back-against-beijings-claim>

pengaruh Tiongkok<sup>9</sup>. Sebaliknya, Tiongkok memanfaatkan pulau-pulau dan fitur maritim di kawasan tersebut untuk melemahkan kebijakan penahanan Amerika Serikat dan sekutunya<sup>10</sup>, sehingga menjadikan Laut Tiongkok Selatan sebagai ruang kontestasi politik dan militer.

Bagi negara-negara ASEAN, Laut Tiongkok Selatan memiliki dimensi geopolitik yang kompleks karena melibatkan klaim tumpang tindih antara Tiongkok dan beberapa negara Asia Tenggara, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Situasi ini menjadikan kawasan tersebut sebagai episentrum sengketa yang melibatkan klaim historis Tiongkok, kedaulatan negara-negara ASEAN, serta kepentingan strategis kekuatan eksternal<sup>11</sup>.

Ketegangan semakin meningkat ketika Tiongkok membangun pulau buatan dan menempatkan kekuatan militer di Kepulauan Spratly, yang memicu reaksi keras dari negara-negara pengklaim lain serta mendorong Amerika Serikat untuk secara rutin melakukan operasi kebebasan navigasi. Oleh karena itu, Laut Tiongkok Selatan tidak hanya mencerminkan konflik teritorial, tetapi juga persaingan strategis global yang berkelanjutan antara

kekuatan besar dan negara-negara kawasan.

### **Klaim Teritorial dan Sengketa Wilayah di Laut Tiongkok Selatan**

Sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi sumber utama ketegangan keamanan di kawasan. Wilayah ini diperebutkan karena memiliki ratusan pulau kecil, karang, dan terumbu di Kepulauan Paracel dan Spratly yang bernilai strategis bagi penguasaan sumber daya maritim dan jalur pelayaran internasional<sup>12</sup>. Negara-negara pesisir seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia berupaya menegaskan klaim kedaulatannya, sehingga menjadikan kawasan ini sebagai ruang sengketa multilateral.

Secara historis, Laut Tiongkok Selatan kerap digambarkan sebagai kawasan yang diliputi ketegangan akibat tumpang tindih klaim teritorial dan rivalitas antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara. Ketegangan tersebut diperparah oleh tindakan Tiongkok seperti pembangunan pulau buatan dan pengawasan militer di wilayah sengketa, serta keterlibatan Amerika Serikat melalui operasi *Freedom of Navigation Operations* dan komitmen keamanan terhadap sekutunya di kawasan.<sup>13</sup>

Kompleksitas sengketa semakin meningkat akibat tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif antarnegara berdasarkan ketentuan

---

<sup>9</sup> Enoch Wong, "What Is the US' Island Chain Strategy and What Does It Mean for China?" *South China Morning Post*, 2025, <https://www.scmp.com/news/china/military/article/3314589/can-island-chain-strategy-contain-chinas-blue-water-naval-ambitions>.

<sup>10</sup> Pornomo Rovani Astri Yoga, "The Historical, Geopolitical, and Legal Background of the South China Sea Dispute," *Maritime Nusantara* 4, no. 1 (2024): 20–62.

<sup>11</sup> *Ibid.*

---

<sup>12</sup> U.S. Energy Information Administration, "Regional Analysis Brief: South China Sea," 2024, <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS>.

<sup>13</sup> Turker, "Maritime Chessboard: The Geopolitical Dynamics of the South China Sea."

*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Klaim “nine-dash line” Tiongkok yang mencakup hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan bertentangan secara langsung dengan klaim ZEE negara-negara ASEAN dan diwujudkan melalui reklamasi besar-besaran serta pembangunan pangkalan militer di terumbu utama Kepulauan Spratly.

Klaim teritorial Tiongkok berakar pada narasi historis yang telah berkembang sejak penerbitan peta sebelas garis putus-putus pada 1947 dan direvisi menjadi sembilan garis pada 1952<sup>14</sup>, yang kemudian diperkuat dengan pembangunan infrastruktur militer dan pengajuan resmi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2009. Klaim ini semakin menimbulkan kontroversi setelah dirilisnya peta “ten-dash line” pada 2023<sup>15</sup>, yang menuai penolakan luas dari negara-negara kawasan karena dinilai bertentangan dengan hukum internasional dan putusan *Permanent Court of Arbitration* tahun 2016<sup>16</sup>.

Selain Tiongkok, negara-negara ASEAN juga mengajukan

klaim berdasarkan faktor geografis, historis, dan hukum laut internasional, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia<sup>17</sup>. Keragaman klaim ini menunjukkan bahwa sengketa Laut Tiongkok Selatan mencerminkan pola interdependensi keamanan regional, di mana klaim kedaulatan, kepentingan ekonomi, dan strategi pertahanan saling berkaitan dan membentuk dinamika keamanan yang kompleks dan berkelanjutan.

### **Kehadiran Militer dan Rivalitas Strategis AS-Tiongkok di Kawasan**

Kehadiran militer dan modernisasi pertahanan di Laut Tiongkok Selatan menjadi indikator utama meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan, yang dipicu oleh ambisi Tiongkok dalam menegaskan klaim kedaulatan serta respons Amerika Serikat dalam mempertahankan kebebasan navigasi. Kedua kekuatan besar ini memproyeksikan kehadiran militer secara intensif, sehingga menjadikan Laut Tiongkok Selatan sebagai ruang strategis yang semakin kompleks dalam tatanan keamanan regional.

Tiongkok secara konsisten memperkuat kehadiran militernya melalui pembangunan infrastruktur pertahanan di tujuh pulau buatan di Kepulauan Spratly sebagai bagian dari strategi penegasan klaim historis dan kepentingan maritimnya<sup>18</sup>. Militerisasi tersebut mencakup

---

<sup>14</sup> Alec Caruana, “Maritime Affairs Program (MAP) Handbill Spotlight: Nine-Dash Line,” *Institute for China-America Studies*, 2023, <https://chinaus-icas.org/research/map-spotlight-nine-dash-line/>.

<sup>15</sup> Hiroshi Mori, “China’s New ‘Ten-Dash Line’ Map Infuriates Asian Neighbors,” *JAPAN Forward*, 2023, <https://japan-forward.com/chinas-new-ten-dash-line-map-infuriates-asian-neighbors/>.

<sup>16</sup> Yavir Pattiasina, Josina Agusthina Yvonne Wattimena, and Johanis Steny Franco Peilouw, “Putusan Permanen Court Of Arbitration Dalam Sengketa Antara Philipina–China Dan Implikasinya Bagi Stabilitas Keamanan Di Laut China Selatan,” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 13–24.

---

<sup>17</sup> U.S. Energy Information Administration, “Regional Analysis Brief: South China Sea.”

<sup>18</sup> Kahfi Khairulsa, “Dampak Kebijakan Luar Negeri China Di Laut China Selatan Terhadap Stabilitas Politik Dan Keamanan Kawasan Asia Tenggara Tahun 2020–2023,” *Diplomacy And Global Security Journal Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional* 2, no. 1 (2025): 87–98, <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i1.3493>.

pembangunan fasilitas pertahanan, sistem radar, lintasan pacu, serta penempatan sistem rudal dan peralatan tempur modern, khususnya di Fiery Cross Reef, Subi Reef, dan Mischief Reef<sup>19</sup>. Strategi *Anti-Access/Area Denial* (A2/AD) menjadi elemen penting dalam kebijakan ini, dengan tujuan membatasi akses Amerika Serikat dan sekutunya serta memperkuat dominasi militer Tiongkok di kawasan<sup>20</sup>.

Kehadiran fasilitas militer tersebut berdampak langsung terhadap keamanan negara-negara Asia Tenggara, karena memperluas jangkauan militer Tiongkok hingga ke Zona Ekonomi Eksklusif Filipina dan Vietnam<sup>21</sup>. Pembangunan pangkalan militer permanen dan penguatan pengawasan udara juga membatasi aktivitas ekonomi maritim dan eksplorasi sumber daya negara-negara kawasan, sehingga menunjukkan bahwa militerisasi Tiongkok tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga merupakan

bagian dari strategi ofensif untuk memperluas kontrol maritim.

Di sisi lain, Amerika Serikat secara aktif mempertahankan kehadiran militernya melalui *Freedom of Navigation Operations* (FONOPs) sejak 2017 sebagai upaya menegakkan prinsip kebebasan navigasi dan tatanan internasional berbasis aturan<sup>22</sup>. Operasi ini secara rutin dilakukan di wilayah yang disengketakan, khususnya di sekitar Kepulauan Spratly, Paracel, dan Scarborough Shoal, serta diperkuat melalui latihan gabungan dan patroli bersama dengan Filipina<sup>23</sup>. Selain itu, Amerika Serikat juga mendorong keterlibatan sekutu seperti Australia dan Inggris dalam FONOPs AS ingin memperluas jaringan kerja sama pertahanan agar negara-negara di Asia Tenggara dapat mempertahankan wilayah perairannya dari agresi Tiongkok<sup>24</sup>.

### **Pembentukan AUKUS**

Aliansi keamanan AUKUS diumumkan pada September 2021 sebagai kemitraan pertahanan antara

---

<sup>19</sup> Arthamevya Zherlindya Putri Darmawan dan Nabilla Kharisma Ardhaneswari, "Konstelasi Geopolitik Tiongkok Di Laut China Selatan: Studi Kasus Reklamasi Dan Militerisasi Pulau Buatan Oleh Tiongkok Di Kepulauan Spratly," *Jurnal Hubungan Internasional Peradaban* 3, no. 2 (2024): 49–76.

<sup>20</sup> Adrianus Revi Dwiguna, "Rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok Di Laut China Selatan Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.7454/jkskn.v2i2.10027>.

<sup>21</sup> Andi Alya Khairunnisa dan Agussalim Burhanuddin, "Militerisasi Pulau Buatan Di Laut China Selatan Oleh Tiongkok: Implikasi Terhadap Keamanan Maritim Negara-Negara Di Kawasan Asia Tenggara," *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2 (2025): 175–190.

---

<sup>22</sup> "A.S. Menantang Klaim Maritim Yang Berlebihan Di Indo-Pasifik Dan Di Seluruh Dunia," *Indo-Pacific Defense FORUM*, 2024,

<https://ipdefenseforum.com/id/2024/06/a-s-menantang-klaim-maritim-yang-berlebihan-di-indo-pasifik-dan-di-seluruh-dunia/>

<sup>23</sup> "Filipina Dan A.S. Menyoroti Kebebasan Navigasi Dengan Patroli Udara Gabungan Di Laut Cina Selatan," *Indo-Pacific Defense FORUM*, 2025,

<https://ipdefenseforum.com/id/2025/03/filipina-dan-a-s-menyoroti-kebebasan-navigasi-dengan-patroli-udara-gabungan-di-laut-tiongkok-selatan/>.

<sup>24</sup> Stephen Dziedzic dan Andrew Greene, "US Official Urges Australia to Participate in South China Sea Freedom of Navigation Operations," *ABC News*, 2020, <https://www.abc.net.au/news/2020-07-27/australia-pressured-to-participate-in-south-china-sea-operation/12496326>.



Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang bertujuan melindungi kepentingan bersama serta memperkuat stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Fokus utama kemitraan ini adalah pengembangan kapal selam bertenaga nuklir dengan persenjataan konvensional bagi Australia melalui pengembangan SSN-AUKUS, yang dirancang untuk memastikan keunggulan strategis jangka panjang di domain bawah laut.<sup>25</sup>

Aliansi keamanan AUKUS lahir dalam situasi Indo-Pasifik yang semakin menjadi pusat kompetisi geopolitik global dengan berbagai potensi titik konflik, mulai dari sengketa teritorial, proliferasi nuklir, perubahan iklim, hingga ancaman non-negara seperti terorisme dan kejahatan transnasional.<sup>26</sup>

Pembentukan AUKUS juga tidak lepas dari meningkatnya kekhawatiran negara-negara di kawasan terhadap ambisi dan dominasi Tiongkok. Tiongkok dianggap semakin agresif, baik dalam memperluas pengaruh ekonominya maupun dalam memperkuat kapasitas militer di Indo-Pasifik. Salah satu titik fokus utama adalah Laut Tiongkok Selatan, di mana Tiongkok mengklaim

sebagian besar wilayah tersebut, termasuk wilayah yang menjadi kepentingan strategis negara-negara tetangga. Pandemi COVID-19, potensi konflik terkait Taiwan, dan kebijakan maritim Tiongkok memperkuat persepsi bahwa keamanan regional berada pada risiko tinggi. Australia, sebagai negara dengan kepentingan langsung di Indo-Pasifik, menilai Tiongkok sebagai ancaman bagi kedaulatan dan stabilitas kawasan, sehingga AUKUS hadir sebagai instrumen untuk memperkuat posisi Australia secara strategis.<sup>27</sup>

Kepentingan Amerika Serikat dan Inggris juga menjadi faktor pendorong utama pembentukan AUKUS. Amerika Serikat memandang Tiongkok sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan tatanan internasional berbasis aturan, sementara Inggris menilai bahwa pendekatan kolektif dengan sekutu diperlukan untuk mencegah dominasi Tiongkok melalui tekanan ekonomi dan pengaruh politik.<sup>28</sup> Dengan demikian, AUKUS tidak hanya dibentuk untuk menghadapi ancaman militer, tetapi juga sebagai respons strategis terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik.

Dalam kerangka kebijakannya, AUKUS terdiri atas dua pilar utama. *Pillar I* berfokus pada pemberian akses teknologi propulsi nuklir kepada Australia

---

<sup>25</sup> Commonwealth of Australia, *The AUKUS Nuclear Powered Submarine Pathway: A Partnership for the Future*, 2023.

<sup>26</sup> The Hon Scott Morrison, The Hon Peter Dutton, and Senator the Hon Marise Payne, "Joint Media Statement: Australia to Pursue Nuclear-Powered Submarines through New Trilateral Enhanced Security Partnership," *Defence Ministers (Australian Government)*, 2021, <https://www.minister.defence.gov.au/statements/2021-09-16/joint-media-statement-australia-pursue-nuclear-powered-submarines-through-new-trilateral-enhanced-security-partnership>.

---

<sup>27</sup> Kheista Mardhatillah Firsia, Sri Yuniati, dan Honest Dody Molasy, "Dukungan Filipina terhadap AUKUS 2021–2023," *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 16, no. 1 (2024): 42–56.

<sup>28</sup> Kheista Mardhatillah Firsia, Sri Yuniati, dan Honest Dody Molasy, "Dukungan Filipina terhadap AUKUS 2021–2023," *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 16, no. 1 (2024): 42–56.

untuk pengembangan kapal selam bertenaga nuklir konvensional, termasuk rencana pembangunan SSN-AUKUS dan penempatan kapal selam Amerika Serikat serta Inggris di kawasan Indo-Pasifik melalui program “*Submarine Rotational Force-West*”<sup>29</sup>. *Pillar II* menitikberatkan pada kolaborasi pengembangan teknologi pertahanan canggih seperti kecerdasan buatan, teknologi kuantum, sistem otonom bawah laut, siber, hipersonik, dan peperangan elektronik<sup>30</sup>.

Penguatan kapabilitas militer Australia melalui AUKUS diproyeksikan mengubah keseimbangan strategis kawasan. Kapal selam bertenaga nuklir memungkinkan Australia beroperasi di jalur strategis seperti Laut Tiongkok Selatan dan Selat Taiwan<sup>31</sup>. Dengan jangkauan yang jauh lebih luas, Australia dapat berperan langsung dalam operasi bersama dengan AS yang akan mengancam Tiongkok dari arah selatan untuk menghadapi Angkatan Laut Tiongkok (*PLAN*), termasuk kemampuan melancarkan serangan rudal jelajah terhadap target di pesisir Tiongkok saat berada di perairan sebelah timur Filipina<sup>32</sup>. Inilah yang membuat kehadiran

AUKUS dipersepsikan sebagai *game changer* dalam strategi militer kawasan.

Perkembangan proyek AUKUS hingga saat ini menunjukkan kemajuan nyata, khususnya dalam pengembangan kapabilitas kapal selam bertenaga nuklir Australia dan kerja sama teknologi persenjataan. Dalam kerangka pengembangan kapal selam nuklir, penandatanganan *Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement* (ENNPIA) pada 22 November 2021 memungkinkan transfer informasi propulsi nuklir dan membuka jalan bagi Australia untuk memperoleh delapan kapal selam bertenaga nuklir pertamanya. Kapal selam ini memiliki keunggulan daya tahan dan kemampuan menyelam jauh lebih lama dibandingkan kapal selam diesel-listrik. Implementasi proyek tersebut juga diikuti pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk investasi sekitar 10 miliar dolar AS untuk pengembangan pangkalan baru, serta pelatihan awak kapal selam Australia oleh Inggris melalui kapal selam kelas *Astute*, yang merupakan salah satu kapal selam terbaik di dunia.<sup>33</sup>

AUKUS juga mendorong pengembangan sejumlah inisiatif strategis yang masih berada dalam tahap implementasi. Salah satunya adalah pengembangan rudal hipersonik melalui program *Southern Cross Integrated Flight Research Experiment* (SCIFiRE), yang telah dijalankan oleh Australia dan

---

<sup>29</sup> Lauren Kahn, “AUKUS Explained: How Will the Trilateral Pact Shape Indo-Pacific Security?” *Council on Foreign Relations*, 2023, <https://www.cfr.org/in-brief/aukus-explained-how-will-trilateral-pact-shape-indo-pacific-security>.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Park Byong-su, “AUKUS Puts South China Sea in Reach of Submarines, Prompts Debate over Nuclear Proliferation,” *Hankyoreh*, 2023, [https://english.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_international/1086654.html#](https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/1086654.html#).

<sup>32</sup> Castro, “Philippines Enhances Ties with AUKUS.”

---

<sup>33</sup> Ali Martin dan Diva Ayu Safitri, “Ancaman Keamanan Indo-Pasifik terhadap Keputusan Australia Membangun Kapal Selam Tenaga Nuklir Tahun 2021,” *Prosiding SENASPOLHI 4* (2022).



Amerika Serikat sejak 2020 dan kini berada dalam kerangka AUKUS<sup>34</sup>. Selain itu, AUKUS menginisiasi pembangunan *Deep Space Advanced Radar Capability* (DARC) sebagai sistem radar jarak jauh untuk deteksi dan pelacakan objek luar angkasa, dengan fasilitas pertama direncanakan beroperasi di Australia Barat pada 2026 dan instalasi lanjutan di Amerika Serikat serta Inggris pada 2030<sup>35</sup>.

Australia juga semakin aktif terlibat dalam operasi militer di Laut Tiongkok Selatan bersama sekutu-sekutunya. Sejak AUKUS dibentuk, Angkatan Laut Australia berpartisipasi dalam latihan gabungan, transit kapal perang, patroli kebebasan navigasi, hingga operasi kehadiran (*presence deployments*) bersama AS, Inggris, Filipina, dan beberapa negara lainnya. Aktivitas ini sekaligus memperlihatkan implementasi nyata dari kebijakan AUKUS dalam mendukung prinsip *freedom of navigation* di kawasan<sup>36</sup>, meskipun tidak semua detail operasinya dipublikasikan karena alasan sensitivitas keamanan.

### **Persepsi dan Respon Tiongkok terhadap AUKUS**

Sikap Tiongkok terhadap pembentukan AUKUS tidak dapat

dilepaskan dari dua dimensi utama, yaitu bagaimana aliansi tersebut dipersepsikan dan bagaimana persepsi itu diwujudkan dalam bentuk respons kebijakan. Persepsi dalam Hubungan Internasional merujuk pada cara negara membentuk pemahaman dan keyakinan mengenai aktor lain, termasuk citra dan intensi yang dilekatkan pada tindakan pihak tersebut, sebagaimana ditegaskan oleh Robert Jervis bahwa persepsi merupakan hasil penafsiran yang dipengaruhi oleh pengalaman, asumsi, dan kerangka berpikir para pengambil keputusan. Akibatnya, tindakan yang sama dapat dimaknai secara berbeda oleh aktor yang berbeda, sehingga kebijakan keamanan atau pembentukan aliansi sering kali memicu ketegangan meskipun tidak selalu dimaksudkan demikian oleh aktor pemrakarsa.<sup>37</sup>

Respons merupakan manifestasi nyata dari hasil persepsi tersebut dalam bentuk kebijakan atau tindakan politik luar negeri. Perbedaan mendasar antara persepsi dan respons terletak pada ranahnya, di mana persepsi berada pada tingkat kognitif dan interpretatif, sedangkan respons berada pada tingkat perilaku dan kebijakan<sup>38</sup>, sehingga eskalasi atau penurunan ketegangan internasional sangat ditentukan oleh bagaimana suatu tindakan dipersepsikan dan kemudian direspons oleh aktor lain.

<sup>34</sup> Royal Australian Air Force, "SCiFiRE Hypersonics," *Australian Air Force*, 2021, diakses 13 Januari 2026, <https://www.airforce.gov.au/our-work/projects-and-programs/scifire-hypersonics>.

<sup>35</sup> Kheista Mardhatillah Firsya, Sri Yuniati, dan Honest Dody Molasy, "Dukungan Filipina terhadap AUKUS 2021–2023," *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 16, no. 1 (2024): 42–56.

<sup>36</sup> Dziedzic, "Australian Navy Joins UK to Conduct Freedom of Navigation Exercises in Contested South China Sea."

<sup>37</sup> Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics*, new ed. (Princeton: Princeton University Press, 2017).

<sup>38</sup> Debbie Affianty, *Politik Internasional: Diktat Mata Kuliah* (Jakarta: Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016).

Pembentukan AUKUS dipersepsikan oleh Tiongkok bukan sekadar kerja sama pertahanan trilateral, melainkan sebagai upaya strategis Amerika Serikat dan sekutunya untuk memperluas jaringan penyeimbangan terhadap pengaruh Tiongkok di Indo-Pasifik. Aliansi ini dipandang sebagai bentuk baru dari *containment policy* yang secara langsung menargetkan kepentingan Tiongkok, khususnya di Laut Tiongkok Selatan dan sekitar Selat Taiwan, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas keamanan regional.

Respons awal Tiongkok tercermin dalam pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian, yang menyebut AUKUS sebagai langkah “sangat tidak bertanggung jawab” dan berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan Asia-Pasifik. Ia menegaskan bahwa kemitraan tersebut akan merusak perdamaian dan stabilitas regional serta memperburuk situasi keamanan, seraya menuduh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia membentuk blok eksklusif yang secara langsung mengancam kepentingan negara ketiga, termasuk Tiongkok<sup>39</sup>. Pernyataan ini mencerminkan persepsi bahwa AUKUS merupakan simbol pembentukan kembali garis pembatas geopolitik di Indo-Pasifik dengan nuansa kebangkitan mentalitas Perang Dingin.

---

<sup>39</sup> Catherine Wong, “China Hits out at ‘Highly Irresponsible’ AUKUS Defence Pact between US, Britain and Australia and Warns of Pacific Arms Race,” *South China Morning Post*, 2021, <https://amp.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3149052/china-hits-out-highly-irresponsible-aukus-defence-pact-between>.

Isu paling sensitif bagi Tiongkok adalah pengalihan teknologi kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat dan Inggris kepada Australia. Pemerintah Tiongkok menilai langkah ini melanggar tujuan dan semangat Traktat Non-Proliferasi Nuklir karena melibatkan transfer uranium dengan tingkat pengayaan tinggi kepada negara non-nuklir, serta berpotensi mengikis integritas dan efektivitas rezim non-proliferasi internasional. Melalui pernyataan Wang Wenbin, Tiongkok juga mendesak agar Badan Energi Atom Internasional tidak memberikan pengecualian terhadap kesepakatan AUKUS.<sup>40</sup>

Selain itu, Tiongkok menyoroti bahwa AUKUS berpotensi menghambat upaya pembentukan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara sebagaimana tertuang dalam *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ)*. Kritik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis non-proliferasi, tetapi juga menyampaikan pesan politik bahwa AUKUS mengabaikan prinsip sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan regional.<sup>41</sup>

Melalui narasi normatif, Tiongkok membingkai AUKUS sebagai simbol ketidakadilan tatanan internasional dan praktik dominasi

---

<sup>40</sup> America Times News Service, “China’s Reaction to AUKUS Agreement,” *The America Times*, 2023, <https://www.america-times.com/chinas-reaction-to-aukus-agreement/>.

<sup>41</sup> “China Renews Attack on AUKUS, Says the Three Countries Are Pursuing ‘the Rule of the Jungle,’” *ABC News*, 2021, <https://www.abc.net.au/news/2021-10-23/china-aukus-pact-nuclear-proliferation-regional-stability/100562476>.

kekuatan Barat yang mengandalkan “aturan rimba di mana yang kuat menindas yang lemah”<sup>42</sup>. Persepsi ini menunjukkan bahwa respons Tiongkok tidak semata didorong oleh perhitungan material, tetapi juga oleh aspek identitas, ideologi, dan pemaknaan terhadap norma internasional, sejalan dengan pendekatan konstruktivis dalam Hubungan Internasional.

Dalam kerangka Kompleks Keamanan Regional, persepsi ancaman yang ditimbulkan oleh AUKUS memperlihatkan keterkaitan erat antara keamanan Tiongkok dan kebijakan pertahanan negara-negara anggota AUKUS. Peningkatan kapabilitas militer AUKUS dipersepsikan Tiongkok sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas kawasan, yang memperdalam pola *security interdependence* serta memperkuat struktur hubungan *amity-enmity* di Indo-Pasifik, khususnya di Laut Tiongkok Selatan.

#### **Potensi Konflik AUKUS–Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan**

Potensi konflik antara AUKUS dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan muncul sebagai konsekuensi dari keterkaitan ancaman dan rivalitas strategis yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik. Dalam kerangka *Regional Security Complex Theory*, dinamika keamanan kawasan tidak semata ditentukan oleh peningkatan kapabilitas militer, melainkan oleh tingkat *security interdependence* dan pola hubungan *amity-enmity* yang telah terbentuk di antara aktor-aktor utama<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Barry Buzan dan Ole Wæver, *Regions and Powers: The Structures of International Security* (Cambridge: Cambridge University

Pembentukan AUKUS memperkuat struktur keamanan regional yang kompetitif dengan memperdalam hubungan permusuhan antara blok Barat dan Tiongkok, sekaligus memperluas keterkaitan isu keamanan di Laut Tiongkok Selatan.

Melalui dua pilarnya, AUKUS mengembangkan kerja sama teknologi pertahanan strategis, termasuk kapal selam bertenaga nuklir, sistem bawah laut tanpa awak, kecerdasan buatan, dan senjata hipersonik. Kehadiran teknologi militer canggih ini mengubah peta kekuatan maritim kawasan dan dipersepsikan Tiongkok sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya, khususnya karena kemampuan kapal selam nuklir Australia untuk beroperasi lama dan menjangkau wilayah strategis di sekitar Pulau Hainan. Kondisi ini membuat Beijing khawatir strategi pertahanannya bisa terganggu dan kemampuan nuklirnya mudah dipantau.<sup>44</sup>

Selain dimensi militer, AUKUS juga dipandang Tiongkok berpotensi mengancam jalur perdagangan dan kepentingan ekonominya. Dari perspektif Beijing, keberadaan kapal selam bertenaga nuklir dan rudal jarak jauh sekutu dapat menekan jalur laut vital yang menjadi rute utama energi dan perdagangan, sehingga AUKUS dipersepsikan bukan hanya sebagai penguatan pertahanan Australia, melainkan sebagai strategi geopolitik untuk membatasi ruang gerak

Press, 2003), <https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.42>.

<sup>44</sup> Benjamin Herscovitch, “China Says AUKUS Is ‘Driven by Cold War Thinking’. Here Are 3 Reasons It Is so Threatened by the Pact,” *The Conversation*, 2024, <https://doi.org/10.64628/AA.gfc3vwuxp>.

Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.<sup>45</sup>

Sebagai respons, Tiongkok mempercepat modernisasi militernya dengan target menjadikan *People's Liberation Army* siap menghadapi potensi konflik di Indo-Pasifik pada 2027. Fokus utama diarahkan pada penguatan Angkatan Laut Tiongkok yang diproyeksikan memiliki hingga 440 kapal perang pada 2030<sup>46</sup>, guna mempertahankan klaim wilayah dan menandingi kehadiran militer sekutu di kawasan.

Peningkatan kekuatan kedua pihak Peningkatan kekuatan kedua pihak ini membuat Laut Tiongkok Selatan semakin tegang. Latihan militer gabungan antara Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan Filipina semakin sering dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan meningkatnya kehadiran sekutu di kawasan. Pada 6–7 Februari 2025, Angkatan Laut Amerika Serikat (*USN*), Angkatan Laut Kerajaan Australia (*RAN*), dan Angkatan Laut Kerajaan Inggris (*RN*) melaksanakan latihan gabungan di Laut Tiongkok Selatan yang mencakup latihan penghubung (*linking exercise*), manuver terkoordinasi, serta operasi bersama lintas armada. Dalam latihan tersebut, ketiga kapal melakukan pertukaran data melalui sistem *tactical datalink* dan latihan manuver dalam berbagai kondisi laut untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri serta komunikasi antar-angkatan laut sekutu.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> John Hemmings, "AUKUS: Enhancing Undersea Deterrence," *Pacific Forum*, 2023, <https://pacforum.org/publications/pacnet-39-aukus-enhancing-undersea-deterrence/>.

<sup>47</sup> Ronan Williams, "US, Australia, and UK Forces Conduct Joint Combined

Sebelumnya, pada 25–27 November 2023, Filipina dan Australia menggelar *Maritime Cooperative Activity* pertama mereka di Laut Tiongkok Selatan, melibatkan tiga kapal perang dan enam pesawat dari *Armed Forces of the Philippines* (*AFP*) serta *Australian Defence Force* (*ADF*). Latihan ini dilakukan di dalam zona ekonomi eksklusif (*ZEE*) Filipina, yang dikenal sebagai *West Philippine Sea*, dan bertujuan memperkuat interoperabilitas maritim di tengah meningkatnya aktivitas Tiongkok di kawasan. Meskipun tidak terjadi insiden langsung, militer Filipina melaporkan bahwa kapal perang dan pesawat Tiongkok membayangi patroli tersebut, bahkan pesawat tempur Tiongkok sempat "mengitari" pesawat Filipina selama patroli bersama dengan Angkatan Udara Australia di dekat terumbu Hubo.<sup>48</sup>

Patroli gabungan antara Filipina dan Amerika Serikat juga kerap dilakukan dan diikuti oleh kehadiran frigat serta pesawat patroli Tiongkok yang memantau dari jarak dekat. Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (*PLA Southern Theater Command*) kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengecam aktivitas tersebut, menuduh Filipina "berkolusi dengan kekuatan eksternal untuk

---

Operations," *Commander, U.S. Pacific Fleet*, 2025, <https://www.cpf.navy.mil/Newsroom/News/Article/4062934/us-australia-and-uk-forces-conduct-joint-combined-operations/>.

<sup>48</sup> Aaron-Matthew Lariosa, "Philippines Holds Joint Patrols with Australia in the South China Sea," *USNI News*, November 28, 2023, <https://news.usni.org/2023/11/28/philippines-holds-joint-patrols-with-australia-in-the-south-china-sea>.

menimbulkan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan” dan menyatakan bahwa kegiatan tersebut melanggar semangat *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*<sup>49</sup>. Sebagai balasan, Tiongkok meningkatkan patroli kapal perangnya dan melakukan manuver di wilayah yang sama, bahkan hingga ke perairan dekat Australia<sup>50</sup>.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa AUKUS dan Tiongkok terjebak dalam pola aksi–reaksi yang memperkuat ketegangan kawasan. Upaya AUKUS memperkuat *deterrence* dan menegaskan kebebasan navigasi dipersepsikan Tiongkok sebagai bentuk pengepungan strategis, sehingga memperdalam dilema keamanan dan meningkatkan risiko eskalasi.

Potensi konflik AUKUS–Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan bersumber dari dua faktor utama, yaitu faktor material berupa peningkatan kapabilitas militer dan kehadiran fisik, serta faktor ideasional berupa perbedaan interpretasi terhadap keamanan dan stabilitas kawasan. Interaksi kedua faktor ini memperlihatkan bahwa AUKUS tidak hanya berdampak pada hubungan Australia–Tiongkok, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas keamanan regional Asia Tenggara secara keseluruhan.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> John Menadue, “The AUKUS Chickens Are Coming Home to Roost, Already,” *Pearls and Irritations*, accessed October 13, 2025, <https://publish.pearlsandirritations.com/the-aukus-chickens-are-coming-home-to-roost-already/>.

## **Respons Negara-Negara Asia Tenggara terhadap AUKUS**

Asia Tenggara menempati posisi strategis dalam dinamika keamanan Indo-Pasifik, sehingga pembentukan AUKUS tidak hanya berdampak pada aliansi trilateral tersebut, tetapi juga memengaruhi cara negara-negara ASEAN memosisikan diri di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan untuk memengaruhi ASEAN dan negara-negara anggotanya semakin terlihat jelas, mengingat implementasi AUKUS seperti pembangunan kapal selam bertenaga nuklir diproyeksikan akan beroperasi terutama di perairan Asia Tenggara, termasuk Laut Tiongkok Selatan<sup>51</sup>, menjadikan respons negara-negara kawasan sebagai faktor penting dalam membentuk lanskap keamanan regional.

Filipina muncul sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang paling terbuka mendukung AUKUS. Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin menyatakan bahwa AUKUS dapat membantu menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dengan berfungsi sebagai penyeimbang terhadap meningkatnya agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Dukungan ini didasarkan pada persepsi adanya ketidakseimbangan kekuatan di Asia Tenggara serta keterbatasan kapabilitas militer negara-negara ASEAN dalam menghadapi pengaruh Tiongkok, sementara Australia dipandang mampu merespons cepat melalui penguatan

---

<sup>51</sup> Mingjiang Li, “ASEAN’s Responses to AUKUS: Implications for Strategic Realignments in the Indo-Pacific,” *China International Strategy Review* 4, no. 2 (2022): 268–87, <https://doi.org/10.1007/s42533-022-00121-2>.

kapabilitas kapal selam bertenaga nuklirnya<sup>52</sup>. Dukungan Filipina juga tercermin dalam keterlibatan Inggris sebagai pengamat dalam latihan Balikatan 2022<sup>53</sup>, yang menandai bentuk awal kerja sama militer yang melibatkan seluruh anggota AUKUS dengan negara Asia Tenggara.

Singapura mengambil sikap yang relatif sejalan dengan Filipina, dengan memandang AUKUS sebagai bagian dari arsitektur keamanan regional yang berpotensi berkontribusi pada stabilitas kawasan. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menegaskan bahwa Singapura menerima AUKUS sejauh konsisten dengan prinsip stabilitas Asia-Pasifik, menjunjung tatanan berbasis aturan, dan tidak mengabaikan sentralitas ASEAN<sup>54</sup>. Sikap ini mencerminkan pendekatan pragmatis Singapura dalam menjaga hubungan dengan kekuatan besar sekaligus mempertahankan ASEAN sebagai poros utama arsitektur keamanan regional.

Vietnam menunjukkan respons yang lebih berhati-hati namun tidak konfrontatif. Pemerintah Vietnam menekankan bahwa semua

negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, serta menegaskan bahwa penggunaan energi nuklir harus terbatas pada tujuan damai dengan memperhatikan keselamatan manusia dan lingkungan<sup>55</sup>. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian Vietnam terhadap aspek teknologi nuklir AUKUS tanpa secara langsung menentang aliansi tersebut.

Sebaliknya, Malaysia mengambil posisi yang lebih kritis terhadap AUKUS. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menyatakan kekhawatiran bahwa AUKUS berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir dan meningkatkan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Malaysia menegaskan komitmennya terhadap prinsip *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN)* serta menyampaikan kekhawatiran bahwa AUKUS dapat memperburuk rivalitas kekuatan besar di kawasan<sup>56</sup>. Sikap kritis ini diperkuat oleh pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia yang menyoroti risiko eskalasi keamanan dan kemungkinan melemahnya stabilitas regional<sup>57</sup>.

---

<sup>52</sup> Renato Cruz de Castro, "Philippines Enhances Ties with AUKUS," *Asia Maritime Transparency Initiative*, 2021, <https://amti.csis.org/philippines-enhances-ties-with-aukus/>.

<sup>53</sup> Radio Free Asia, "UK Military Might Observe Renewed Full-Scale Balikatan Drills in Philippines," 2021, <https://www.rfa.org/english/news/china/drills-10142021154339.html>.

<sup>54</sup> Matthew Mohan, "Singapore Welcomes Australia's Assurance That AUKUS Will Promote 'Stable and Secure' Asia Pacific: PM Lee," *Channel News Asia*, 2021, <https://www.channelnewsasia.com/singapore/singapore-welcomes-australias-assurance-aukus-will-promote-stable-and-secure-asia-pacific-pm-lee-2271826>.

---

<sup>55</sup> Tu Anh, "Vietnam Spells out Stance on AUKUS," *Hanoitimes*, 2021, <https://hanoitimes.vn/vietnam-spells-out-stance-on-aukus-318802.html>.

<sup>56</sup> Chris Barrett dan James Massola, "Malaysia Warns AUKUS Pact Will Spark Nuclear Arms Race in Indo-Pacific," *The Sydney Morning Herald*, 2021, <https://www.smh.com.au/world/asia/malaysia-a-warns-aukus-pact-will-spark-nuclear-arms-race-in-indo-pacific-20210918-p58stm.html>.

<sup>57</sup> The Malaysian Ministry of Foreign Affairs, "Announcement by Australia, United Kingdom and the United States on Enhanced Trilateral Security Partnership – AUKUS," 2021.



Indonesia juga mengambil posisi berhati-hati dan cenderung kritis. Pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap potensi perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan, serta menekankan pentingnya komitmen non-proliferasi nuklir<sup>58</sup>. Sikap Indonesia disampaikan secara diplomatis tanpa secara eksplisit menyebut AUKUS, yang mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara menyuarakan kekhawatiran keamanan dan menghindari friksi terbuka dengan Australia maupun sekutu Barat. Kekhawatiran ini turut diperkuat oleh pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan keprihatinannya kepada Perdana Menteri Australia saat itu, Scott Morrison, mengenai potensi meningkatnya rivalitas kawasan akibat AUKUS<sup>59</sup>.

Sementara itu, sejumlah negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Kamboja, Laos, Brunei, dan Myanmar memilih untuk menjaga profil rendah dengan tidak mengeluarkan pernyataan resmi yang tegas. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian diplomatik serta pertimbangan politik domestik, sekaligus menunjukkan kecenderungan menerima AUKUS sebagai bagian dari realitas baru dalam tatanan keamanan kawasan. Meskipun disampaikan secara implisit, negara-negara tersebut

menegaskan pentingnya stabilitas kawasan dan sentralitas ASEAN dalam menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks.<sup>60</sup>

### **Fragmentasi Persepsi dan Respons Negara-Negara ASEAN terhadap AUKUS**

Respons negara-negara ASEAN terhadap pembentukan AUKUS menunjukkan adanya fragmentasi sikap dan perbedaan interpretasi ancaman yang signifikan di kawasan Asia Tenggara. Filipina dan Singapura memaknai AUKUS sebagai peluang strategis untuk menjaga stabilitas kawasan dengan menekankan fungsinya sebagai penyeimbang terhadap meningkatnya pengaruh dan agresivitas Tiongkok di Indo-Pasifik. Vietnam mengambil posisi yang lebih berhati-hati dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, tanpa secara langsung menentang kehadiran AUKUS.

Sebaliknya, Malaysia dan Indonesia menampilkan sikap yang lebih kritis terhadap AUKUS dengan menyoroti risiko perlombaan senjata dan implikasinya terhadap stabilitas kawasan, meskipun tetap menjaga ruang diplomasi yang relatif netral. Sementara itu, Thailand, Kamboja, Laos, Brunei, dan Myanmar memilih untuk tidak mengambil posisi terbuka, yang dapat dimaknai sebagai bentuk penerimaan secara tersirat yang dilandasi kehati-hatian diplomatik serta pertimbangan politik domestik.

---

<sup>58</sup> Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, "Statement on Australia's Nuclear-Powered Submarines Program," 2021.

<sup>59</sup> Kentaro Iwamoto, "AUKUS Roils ASEAN Waters Ahead of East Asia Summit," *Nikkei Asia*, 2021, <https://asia.nikkei.com/politics/international-relations/aukus-roils-asean-waters-ahead-of-east-asia-summit>.

---

<sup>60</sup> Mingjiang Li, "ASEAN's Responses to AUKUS: Implications for Strategic Realignments in the Indo-Pacific," *China International Strategy Review* 4, no. 2 (2022): 268–87, <https://doi.org/10.1007/s42533-022-00121-2>.

Fragmentasi persepsi dan respons tersebut tercermin dalam perbedaan sikap negara-negara ASEAN yang menunjukkan spektrum respons mulai dari dukungan terbuka, dukungan bersyarat, sikap hati-hati, hingga penerimaan diam-diam. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa AUKUS tidak dipahami secara seragam sebagai ancaman maupun peluang, melainkan dimaknai sesuai dengan kepentingan strategis dan pengalaman historis masing-masing negara.

Dalam perspektif konstruktivisme, fragmentasi ini menunjukkan bahwa persepsi ancaman dan peluang tidak bersifat objektif, melainkan dibentuk oleh konstruksi identitas, pengalaman historis, serta interaksi sosial-politik yang unik di setiap negara ASEAN. Sementara itu, melalui lensa Kompleks Keamanan Regional, AUKUS dapat dipahami sebagai faktor yang memperdalam keterkaitan keamanan Asia Tenggara dengan rivalitas kekuatan besar, sehingga memperkuat interdependensi ancaman di kawasan dan menantang kohesi serta sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan regional.

#### **AUKUS dan Ketegangan Regional di Laut Tiongkok Selatan**

Pembentukan aliansi keamanan trilateral AUKUS pada tahun 2021 antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menandai perubahan penting dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik. Aliansi ini berfungsi tidak hanya sebagai kerja sama pertahanan, tetapi juga sebagai instrumen geopolitik yang memperkuat posisi strategis kekuatan Barat dalam

menyeimbangkan pengaruh Tiongkok, khususnya di Laut Tiongkok Selatan.

Kehadiran AUKUS berdampak langsung pada keseimbangan kekuatan kawasan yang sebelumnya telah diwarnai rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Melalui perspektif Teori Kompleks Keamanan Regional, kondisi ini mencerminkan intensifikasi keterkaitan ancaman (*security interdependence*) akibat keterlibatan kekuatan besar yang memengaruhi konfigurasi keamanan regional.

AUKUS memengaruhi dinamika keamanan Laut Tiongkok Selatan melalui peningkatan kapabilitas militer dan teknologi strategis Australia, terutama melalui pengadaan kapal selam bertenaga nuklir dan pengembangan sistem pertahanan canggih. Peningkatan ini memperluas jangkauan operasi Australia dan mengubah struktur kekuatan maritim kawasan, menjadikannya aktor aktif dalam menjaga kebebasan navigasi.

Keterlibatan langsung kekuatan besar dalam arsitektur pertahanan kawasan mempersempit ruang netralitas strategis Asia Tenggara. Sebagaimana dijelaskan oleh Buzan dan Wæver (2003), keterlibatan tersebut dapat memperkuat stabilitas sekaligus memperdalam ketegangan apabila dipersepsikan sebagai ancaman, dan dalam konteks AUKUS, dampak yang muncul cenderung mengarah pada peningkatan ketegangan akibat persepsi Tiongkok terhadap aliansi ini sebagai bentuk penahanan strategis.

Dari sudut pandang konstruktivisme, AUKUS

merupakan hasil konstruksi sosial atas ancaman bersama, yang dibentuk oleh persepsi kolektif Amerika Serikat, Inggris, dan Australia terhadap Tiongkok sebagai kekuatan revisionis yang menantang tatanan internasional berbasis aturan<sup>61</sup>. Identitas ideologis sebagai demokrasi maritim menjadi dasar solidaritas aliansi tersebut, namun pada saat yang sama menimbulkan implikasi serius terhadap persepsi Tiongkok yang memandang AUKUS sebagai tantangan terhadap legitimasi dan statusnya di kawasan.

Reaksi Tiongkok terhadap AUKUS memperlihatkan keterkaitan antara faktor material dan ideasional dalam pembentukan ketegangan regional. Tiongkok menilai transfer teknologi propulsi nuklir kepada Australia berpotensi melanggar semangat Traktat Nonproliferasi Nuklir dan menafsirkan AUKUS sebagai kelanjutan kebijakan *containment* Amerika Serikat.<sup>62</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa persepsi ancaman tidak muncul semata karena peningkatan kapabilitas militer, tetapi juga berakar pada konstruksi historis dan politik yang panjang. Seperti dikemukakan Wendt (1999), struktur sosial internasional dibentuk melalui interaksi antaraktor dan persepsi mereka terhadap niat satu sama lain; ketika interaksi tersebut didominasi rasa saling curiga, sistem keamanan

yang terbentuk menjadi bersifat kompetitif dan antagonistik<sup>63</sup>.

Secara empiris, intensifikasi ketegangan tercermin dari meningkatnya aktivitas militer sekutu di Laut Tiongkok Selatan, termasuk latihan gabungan<sup>64</sup> dan peningkatan interoperabilitas angkatan laut. Pola aksi dan reaksi antara AUKUS dan Tiongkok mencerminkan kondisi *security interdependence*, di mana kebijakan pertahanan satu aktor secara langsung memengaruhi respons aktor lain dalam satu kawasan.

AUKUS juga membawa implikasi terhadap dinamika politik Asia Tenggara dengan menguji prinsip netralitas dan kesatuan ASEAN. Perbedaan pandangan antarnegara anggota terhadap AUKUS menciptakan tantangan bagi ASEAN dalam merumuskan respons kolektif yang terintegrasi di tengah rivalitas kekuatan besar.<sup>65</sup>

Selain aspek keamanan, peningkatan militerisasi di Laut Tiongkok Selatan turut menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan maritim kawasan. Intensitas patroli dan latihan militer yang meningkat berpotensi memicu

---

<sup>61</sup> Zheng Zhihua, "US' 'Freedom of Navigation Operation' Reduced to a Clumsy Geopolitical Show," *China Military*, 2025, [http://eng.chinamil.com.cn/2025xb/O\\_251451/16403076.html](http://eng.chinamil.com.cn/2025xb/O_251451/16403076.html).

<sup>62</sup> Sarah Tzinieris, Zeno Leoni, and Kevin Blachford, "Shedding Light on Chinese Thinking on AUKUS," *Pacific Focus* 39, no. 3 (2024): 499–528, <https://doi.org/10.1111/pafo.12262>.

---

<sup>63</sup> Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999). <https://doi.org/10.1017/cbo9780511612183>.

<sup>64</sup> Aaron-Matthew Lariosa, "Philippines Holds Joint Patrols with Australia in the South China Sea," *USNI News*, November 28, 2023, <https://news.usni.org/2023/11/28/philippines-holds-joint-patrols-with-australia-in-the-south-china-sea>.

<sup>65</sup> Useng Abdul Manan, Agus Subagyo, dan Angga Nurdin Rachmat, "Eksistensi Pakta Pertahanan AUKUS pada Stabilitas Keamanan Indo-Pasifik," *Diplomacy and Global Security Journal* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2884>.

salah perhitungan dan insiden di laut yang dapat mengganggu jalur perdagangan strategis.

Secara normatif, AUKUS memperdalam benturan nilai antara prinsip kebebasan navigasi yang dijunjung aliansi Barat dan klaim kedaulatan historis Tiongkok. Dalam perspektif konstruktivisme, konflik ini mencerminkan benturan identitas dan interpretasi normatif antaraktor, yang memperkuat pola ketegangan dan saling curiga di kawasan.

#### D. KESIMPULAN

Pembentukan aliansi keamanan trilateral AUKUS antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia pada tahun 2021 menjadi titik penting dalam perubahan arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Kehadiran aliansi ini mencerminkan upaya negara-negara anggotanya untuk memperkuat posisi strategis dan menyeimbangkan pengaruh Tiongkok yang semakin menonjol, khususnya di kawasan Laut Tiongkok Selatan, serta menandai pergeseran struktur kekuatan yang berdampak langsung pada dinamika keamanan regional.

Penguatan kapabilitas pertahanan Australia melalui transfer teknologi militer canggih memperluas jangkauan kekuatan maritim sekutu Barat hingga ke Laut Tiongkok Selatan. Perubahan ini meningkatkan sensitivitas kawasan terhadap setiap perkembangan kebijakan pertahanan dan mempersempit ruang bagi negara-negara Asia Tenggara untuk mempertahankan netralitas strategis di tengah rivalitas kekuatan besar.

Kehadiran AUKUS turut mendorong meningkatnya aktivitas

militer dan persaingan strategis di Laut Tiongkok Selatan, yang menjadikan kawasan semakin rentan terhadap potensi gesekan dan salah perhitungan militer. Dinamika ini tidak hanya memengaruhi stabilitas keamanan, tetapi juga menantang efektivitas mekanisme diplomatik regional yang selama ini menjadi penopang stabilitas Asia Tenggara.

Secara keseluruhan, AUKUS dapat dipahami bukan sebagai pemicu awal konflik di Laut Tiongkok Selatan, melainkan sebagai faktor struktural yang memperkuat ketegangan regional dan mempercepat pergeseran kawasan menuju pola keseimbangan kekuatan yang semakin kompetitif.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Affianty, Debbie. *Politik Internasional: Diktat Mata Kuliah*. Jakarta: Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016.
- Ahn, Tu. "Vietnam Spells out Stance on AUKUS." *Hanoi Times*, 2021.  
<https://hanoitimes.vn/vietnam-spells-out-stance-on-aucus-318802.html>.
- Ambarwati, Auliah, et al. "Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 240–246.  
<https://www.researchgate.net/publication/332844551>.
- Anh, Tu. "Vietnam Spells out Stance on AUKUS." *Hanoi Times*, 2021.  
<https://hanoitimes.vn/vietnam-spells-out-stance-on-aucus-318802.html>.

- Barrett, Chris, dan James Massola. "Malaysia Warns AUKUS Pact Will Spark Nuclear Arms Race in Indo-Pacific." *The Sydney Morning Herald*, 2021.  
<https://www.smh.com.au/world/asia/malaysia-warns-aukus-pact-will-spark-nuclear-arms-race-in-indo-pacific-20210918-p58stm.html>.
- Bandial, Erywan Pehin Yusof. "Brunei's Response to AUKUS." *Ministry of Foreign Affairs Brunei Darussalam*, 2021.
- Buzan, Barry, dan Ole Wæver. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Caruana, Alec. "Maritime Affairs Program (MAP) Handbill Spotlight: Nine-Dash Line." Institute for China-America Studies, 2023.  
<https://chinaus-icas.org/research/map-spotlight-nine-dash-line/>.
- Castro, Renato Cruz de. "Philippines Enhances Ties with AUKUS." Asia Maritime Transparency Initiative, 2021.  
<https://amti.csis.org/philippines-enhances-ties-with-aukus/>.
- Chubb, Andrew. "PRC Assertiveness in the South China Sea: Measuring Continuity and Change, 1970–2015." *International Security* 45 (2021).  
[https://doi.org/10.1162/isec\\_a\\_00400](https://doi.org/10.1162/isec_a_00400).
- Commonwealth of Australia. *The AUKUS Nuclear-Powered Submarine Pathway: A Partnership for the Future*. Canberra, 2023.
- Cruz de Castro, Renato. "Philippines Enhances Ties with AUKUS." Asia Maritime Transparency Initiative, 2021.  
<https://amti.csis.org/philippines-enhances-ties-with-aukus/>.
- Dziedzic, Stephen, dan Andrew Greene. "US Official Urges Australia to Participate in South China Sea Freedom of Navigation Operations." *ABC News*, 2020.  
<https://www.abc.net.au/news/2020-07-27/australia-pressured-to-participate-in-south-china-sea-operation/12496326>.
- Firsa, Kheista Mardhatillah, Sri Yuniati, dan Honest Dody Molasy. "Dukungan Filipina terhadap AUKUS 2021–2023." *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* 16, no. 1 (2024): 42–56.
- Grady, John. "Panel: New U.S. South China Sea Report Designed to Push Back Against Beijing's Expansive Claims." *USNI News*, 2022.  
<https://news.usni.org/2022/01/25/panel-new-u-s-south-china-sea-report-designed-to-push-back-against-beijings-claim>.
- Hariyadin, Bangkit Satriyo. "Kepentingan Amerika Serikat dalam Pembentukan Kerja Sama Pertahanan AUKUS Tahun 2021." *Diplomacy and Global Security Journal* 1, no. 1 (2024): 594–609.  
<https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2904>.

- Hemmings, John. "AUKUS: Enhancing Undersea Deterrence." *Pacific Forum*, 2023. <https://pacforum.org/publications/pacnet-39-aucus-enhancing-undersea-deterrence/>.
- Herscovitch, Benjamin. "China Says AUKUS Is 'Driven by Cold War Thinking'." *The Conversation*, 2024. <https://doi.org/10.64628/AA.gfc3vwxup>.
- Iwamoto, Kentaro. "AUKUS Roils ASEAN Waters Ahead of East Asia Summit." *Nikkei Asia*, 2021. <https://asia.nikkei.com/politics/international-relations/aukus-roils-asean-waters-ahead-of-east-asia-summit>.
- Jervis, Robert. *Perception and Misperception in International Politics*. New ed. Princeton: Princeton University Press, 2017.
- Junef, Muhar. "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan." *Jurnal Penelitian Hukum* 18, no. 2 (2018): 219–240.
- Kahn, Lauren. "AUKUS Explained: How Will the Trilateral Pact Shape Indo-Pacific Security?" Council on Foreign Relations, 2023. <https://www.cfr.org/in-brief/aukus-explained-how-will-trilateral-pact-shape-indo-pacific-security>.
- Khairulsah, Kahfi. "Dampak Kebijakan Luar Negeri China di Laut China Selatan terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Kawasan Asia Tenggara Tahun 2020–2023." *Diplomacy and Global Security Journal* 2, no. 1 (2025): 87–98. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i1.3493>.
- Li, Mingjiang. "ASEAN's Responses to AUKUS: Implications for Strategic Realignments in the Indo-Pacific." *China International Strategy Review* 4, no. 2 (2022): 268–287. <https://doi.org/10.1007/s42533-022-00121-2>.
- Lariosa, Aaron-Matthew. "Philippines Holds Joint Patrols with Australia in the South China Sea." *USNI News*, November 28, 2023. <https://news.usni.org/2023/11/28/philippines-holds-joint-patrols-with-australia-in-the-south-china-sea>.
- Menadue, John. "The AUKUS Chickens Are Coming Home to Roost, Already." *Pearls and Irritations*. Accessed October 13, 2025. <https://publish.pearlsandirritations.com/the-aukus-chickens-are-coming-home-to-roost-already/>.
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. "Statement on Australia's Nuclear-Powered Submarines Program." 2021.
- Mohan, Matthew. "Singapore Welcomes Australia's Assurance That AUKUS Will Promote 'Stable and Secure' Asia Pacific." *Channel News Asia*, 2021. <https://www.channelnewsasia.com/singapore/singapore-welcomes-australias-assurance-aukus-will->



- promote-stable-and-secure-  
asia-pacific-pm-lee-2271826.
- The Hon Scott Morrison, The Hon Peter Dutton, and Senator the Hon Marise Payne. “Joint Media Statement: Australia to Pursue Nuclear-Powered Submarines through New Trilateral Enhanced Security Partnership.” Defence Ministers (Australian Government), 2021. <https://www.minister.defence.gov.au/statements/2021-09-16/joint-media-statement-australia-pursue-nuclear-powered-submarines-through-new-trilateral-enhanced-security-partnership>.
- U.S. Energy Information Administration. “Regional Analysis Brief: South China Sea.” 2024. <http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS>.
- Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511612183>.